



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah secara terencana, bertahap, dan terarah, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah secara terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu ditetapkan Program Pembentukan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 tanggal 14 November 2023;
 2. Berita Acara Persetujuan Bersama Nomor: 180/08/HUK dan Nomor: 170/11.22/DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Balikpapan Tahun 2024 sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Propemperda Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
1. 13 (Tiga Belas) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan; dan
2. 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Kota Balikpapan.

KETIGA : Dalam Propemperda 2024 Kota Balikpapan dapat dimuat Daftar Kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. Akibat putusan Mahkamah Agung;
2. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; dan
3. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, DPRD Kota Balikpapan atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar Propemperda karena alasan:
a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah; dan
d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 20 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
KETUA,**



ABDULLOH, S. Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Wali Kota Balikpapan di Balikpapan.
3. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Balikpapan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024

NO	JUDUL PERATURAN	MATERI POKOK	INISIATOR	STATUS			PERANGKAT DAERAH
				BARU	PENYEMPURNAAN	DASAR PELAKSANAAN	
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara	Izin Membuka Tanah Negara	DPRD		√	UU Nomor 26 Tahun 2007	DPPR, DPMPSTP
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame	Izin Penyelenggaraan Reklame	DPRD	√		UU Nomor 28 Tahun 2009	DPMPSTP
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	Ketahanan Keluarga	DPRD	√		PP Nomor 87 Tahun 2014	DP3AKB

4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	DPRD		√	UU Nomor 11 Tahun 2020	DPU
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPRD	√		PP Nomor 122 Tahun 2015	Bappeda Litbang, PDAM
6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan	DPRD		√	UU Nomor 1 Tahun 2011	Disperkim, DPPR, DLH
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	DPRD	√		Putusan Pengadilan	DLH
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan	Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan	DPRD		√	PP Nomor 54 Tahun 2017	Bag. Perekonomian, Perumda Manuntung Sukses

9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	DPRD	√		PP Nomor 27 Tahun 2014	BKAD
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	DPRD	√		Permendagri Nomor 12 Tahun 2019	Kesbangpol
11	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	DPRD	√		Permendagri Nomor 71 Tahun 2012	Kesbangpol
12	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPRD	√		PP Nomor 14 Tahun 2016	Disperkim
13	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan	Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan	DPRD		√	PP Nomor 54 Tahun 2017	Bag. Perekonomian, PDAM

14	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	PEMKOT		√	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018	Bag. Organisasi Setdakot
15	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi	Insentif dan Kemudahan Investasi	PEMKOT	√		PP Nomor 24 Tahun 2019	DPMPTSP
16	Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah	Sistem Kesehatan Daerah	PEMKOT	√		Perpres Nomor 72 Tahun 2012	Dinas Kesehatan
17	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok	Kawasan Sehat Tanpa Rokok	PEMKOT		√	PP Nomor 109 Tahun 2012	Dinas Kesehatan
18	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan	Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota	PEMKOT		√	PP Nomor 17 Tahun 2018	Bag. Pemerintahan Setdakot

19	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak	Kota Layak Anak	PEMKOT	√			DP3AKB
20	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2044	Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2044	PEMKOT	√			DPPR
21	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045	PEMKOT	√			Bappeda Litbang
22	Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	PEMKOT	√			Bag. Hukum

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

K E T U A ,



ABDULLOH, S.Sos